

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan dokumen arsip merupakan komponen penting dalam tata kelola organisasi publik, termasuk lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Arsip tidak hanya berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjadi sumber informasi, alat pengawasan, serta dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, arsip memegang peranan strategis karena berkaitan langsung dengan transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi proses demokrasi. Hal ini juga ditegaskan oleh Mahasiswa Internasional Women University (2026) yang menyatakan bahwa kearsipan bukan sekadar administrasi, melainkan gerbang akuntabilitas demokrasi. Pandangan tersebut sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan, yaitu Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang pada pokoknya mengatur penyelenggaraan sistem kearsipan nasional secara menyeluruh dan terintegrasi. Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menekankan pentingnya penyelenggaraan kearsipan dengan diperkuat oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada menghasilkan arsip dalam jumlah besar dan beragam. KPU menghasilkan berbagai arsip kepemiluan sebagai hasil dari setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Arsip tersebut meliputi arsip fasilitatif yang berasal dari kegiatan pendukung penyelenggaraan serta arsip substantif yang dihasilkan dari pelaksanaan fungsi KPU dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota). Setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada juga menambah volume arsip secara signifikan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pascapemilihan. Arsip-arsip tersebut memiliki peran penting sebagai bukti administrasi dan pertanggungjawaban apabila terjadi sengketa, gugatan, atau laporan terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Oleh karena itu, pengelolaan arsip tidak dapat dipandang sebagai sekadar kegiatan administratif, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemilu (Sarwosambodo, 2026). Kondisi tersebut menuntut pegawai KPU pada jenjang provinsi maupun kabupaten/kota untuk memiliki pemahaman kearsipan yang memadai agar arsip dapat dikelola secara tertib, mudah diakses, dan terjamin keamanannya. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara awal dengan Kepala Subbagian Umum dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah, berbagai kendala masih dijumpai dalam pelaksanaannya, seperti perbedaan kapasitas sumber daya manusia, belum meratanya pemahaman mengenai kearsipan, serta proses transisi dari sistem pengelolaan arsip konvensional menuju sistem digital.

Dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, KPU dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, termasuk dalam bidang kearsipan. Salah satu langkah yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah adalah melalui penyelenggaraan kegiatan NGOPI ASLI (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik). Kegiatan ini merupakan sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh Basmar Perianto Amron, selaku Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan agar seluruh jajaran KPU, khususnya di wilayah Jawa Tengah, memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan arsip dan logistik. Edisi perdana NGOPI ASLI diselenggarakan pada 2 Juni 2025 dengan menghadirkan narasumber dari KPU RI, yaitu Yulianto Sudrajat. NGOPI ASLI merupakan forum diskusi rutin yang dilaksanakan oleh bidang KUL (Keuangan, Umum, dan Logistik) secara mingguan dan melibatkan seluruh pegawai KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah. Forum tersebut turut menghadirkan narasumber dari KPU provinsi di berbagai wilayah Indonesia sebagai sarana

pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam pengelolaan arsip serta logistik Pemilu dan Pilkada.

Berbagai tema yang dibahas dalam kegiatan NGOPI ASLI menunjukkan bahwasanya forum ini dirancang untuk menjawab permasalahan aktual yang dihadapi oleh satuan kerja KPU di daerah. Tema-tema seperti *Logistik dan Arsip Jadi Pilar Akuntabilitas Pemilu*, *Play Off: Aksi Akhir Pengelolaan Arsip dan Logistik Pasca Pemilu*, *Peran SDM dalam Tata Kelola Arsip dan Logistik*, *Clean Sheet: Transparansi Pengelolaan dan Pengarsipan Logistik*, *Alih Media Arsip dari Manual ke Digital Tanpa Kendala*, *Optimalisasi Penyimpanan Arsip dan Logistik ex Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024*, *Penyusutan Arsip: Penilaian, Pemindahan, Pemusnahan, dan Penyerahan Arsip Statis*, *Super-Sub: Transformasi Digital dalam Penggunaan TTE Pada Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)*, *Friendly Match: Strategi Kolaborasi KPU dengan IndoArsip untuk Penguatan Pengelolaan Kearsipan*, hingga *Zona Marking: Menciptakan Alur Kerja Arsip yang Efektif Tanpa Kebocoran Data* mencerminkan adanya serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan pegawai KPU dalam pengelolaan arsip.

Melalui diskusi yang bersifat interaktif dan berbagi pengalaman antar satuan kerja, NGOPI ASLI diharapkan bisa menjadi media pembelajaran informal yang efektif bagi pegawai KPU dalam memahami konsep, regulasi, serta praktik kearsipan yang baik. Namun demikian, meskipun NGOPI ASLI telah dilaksanakan secara rutin dan melibatkan segenap KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah, efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman kearsipan pegawai belum pernah dikaji secara akademik, sehingga memperlihatkan adanya kekosongan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Padahal, pemahaman kearsipan yang baik merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya pengelolaan arsip yang tertib, mudah diakses, dan terjamin keamanannya di lingkungan KPU.

Untuk menilai sejauh mana keterlibatan kegiatan NGOPI ASLI dalam meningkatkan pemahaman kearsipan pegawai KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah, diperlukan landasan teoritis yang mampu menjelaskan proses

pembelajaran yang berlangsung di dalam kegiatan tersebut. Teori yang dianggap sesuai untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah teori pembelajaran informal atau *knowledge creation* yang dikemukakan oleh Nonaka & Takeuchi (1995). Teori ini menekankan penciptaan dan pemanfaatan pengetahuan dalam organisasi melalui interaksi sosial untuk meningkatkan kapasitas individu dan organisasi melalui empat tahapan utama, yaitu *socialization*, *externalization*, *combination*, dan *internalization* (SECI). Dalam kegiatan NGOPI ASLI, diskusi dan berbagi pengalaman antarpegawai KPU memungkinkan terjadinya alih pengetahuan dari pengalaman praktis menjadi pemahaman kearsipan yang lebih baik. Oleh karena itu, teori pembelajaran informal dipandang sesuai untuk menjelaskan peran kegiatan NGOPI ASLI sebagai media pembelajaran informal dalam meningkatkan pemahaman kearsipan pegawai KPU. Dalam perspektif penelitian kuantitatif, kegiatan NGOPI ASLI diposisikan sebagai variabel independen (X) yang diukur melalui empat tahapan Model SECI tersebut. Keempat tahapan tersebut menggambarkan proses pembelajaran informal yang memungkinkan pegawai saling berbagi pengalaman, mengubah pengalaman menjadi pengetahuan yang terdokumentasi, mengintegrasikan berbagai informasi kearsipan, serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Semakin baik proses pembelajaran pada setiap tahapan tersebut berlangsung, semakin tinggi pula pemahaman pegawai terhadap regulasi, prosedur, dan praktik kearsipan. Oleh karena itu, penelitian ini menguji secara empiris pengaruh kegiatan NGOPI ASLI terhadap pemahaman kearsipan pegawai KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “Pengaruh Kegiatan NGOPI ASLI (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) terhadap Pemahaman Kearsipan Pegawai KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah”. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pengaruh kegiatan NGOPI ASLI terhadap pemahaman kearsipan pegawai KPU, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pengembangan program peningkatan kapasitas kearsipan di lingkungan KPU.

1.2 Rumusan Masalah

KPU menghadapi tantangan dalam meningkatkan pemahaman kearsipan pegawai di tengah tingginya volume arsip dan tuntutan pengelolaan arsip yang tertib, mudah diakses, dan terjamin keamanannya. Untuk menjawab tantangan tersebut, KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan NGOPI ASLI sebagai media pembelajaran informal. Namun, efektivitas kegiatan tersebut dalam meningkatkan pemahaman kearsipan pegawai KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah belum diketahui secara pasti dan belum banyak dikaji secara akademik. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu penelitian guna menjawab permasalahan berikut.

1. Seberapa tinggi tingkat pelaksanaan kegiatan NGOPI ASLI sebagai media pembelajaran informal berdasarkan dimensi Model SECI pada pegawai KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah?
2. Seberapa tinggi tingkat pemahaman kearsipan pegawai KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah setelah mengikuti kegiatan NGOPI ASLI?
3. Seberapa signifikan pengaruh kegiatan NGOPI ASLI terhadap pemahaman kearsipan pegawai KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini tujuannya untuk memperoleh informasi dan bukti empiris mengenai pelaksanaan kegiatan NGOPI ASLI serta pengaruhnya terhadap pemahaman kearsipan pegawai KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Untuk mengukur tingkat pelaksanaan kegiatan NGOPI ASLI dalam mendukung proses pembelajaran informal pegawai KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah berdasarkan dimensi Model SECI.

2. Untuk mengukur tingkat pemahaman kearsipan pegawai KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah setelah mengikuti kegiatan NGOPI ASLI.
3. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh kegiatan NGOPI ASLI terhadap pemahaman kearsipan pegawai KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah pengembangan ilmu di bidang kearsipan, terutama mengenai peran pembelajaran informal dalam meningkatkan pemahaman kearsipan pegawai lembaga publik.
- 2) Memberikan referensi akademik terkait hubungan kegiatan diskusi dan pertukaran pengetahuan dengan peningkatan pemahaman kearsipan.
- 3) Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas pengelolaan arsip dan peningkatan kapasitas kearsipan di lingkungan lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KPU Provinsi Jawa Tengah

Menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi KPU Provinsi Jawa Tengah dalam mengembangkan kegiatan NGOPI ASLI serta program peningkatan kapasitas kearsipan guna meningkatkan pemahaman kearsipan pegawai KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah.

b. Bagi Mahasiswa dan Peneliti di Bidang Kearsipan

Menjadi referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa dan peneliti di bidang kearsipan mengenai penerapan pembelajaran informal dalam meningkatkan pemahaman kearsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

c. Bagi Prodi Informasi dan Humas

Menjadi referensi bagi Program Studi Informasi dan Humas dalam pengembangan pembelajaran dan kajian mengenai pengelolaan arsip, pembelajaran informal, serta berbagi pengetahuan di lingkungan organisasi publik.

1.5 Luaran Penelitian

Output yang dihasilkan melalui pelaksanaan tugas akhir ini berupa:

- 1) Artikel ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kegiatan NGOPI ASLI (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) terhadap pemahaman kearsipan pegawai KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah, dengan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 3.
- 2) Infografis yang memuat informasi mengenai kegiatan NGOPI ASLI sebagai media pembelajaran informal dalam meningkatkan pemahaman kearsipan pegawai KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah.
- 3) Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya ilmiah yang dihasilkan sebagai bentuk perlindungan terhadap luaran penelitian.